

EVALUASI PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN DALAM MENURUNKAN ANGKA STUNTING DI DESA SUMBER AGUNG

EVALUATION OF THE SUPPLEMENTARY FEEDING PROGRAM IN REDUCING STUNTING IN SUMBER AGUNG VILLAGE

Achmad Al Fajri Senva Aulia¹, Itok Wicaksono²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jember

^{1,2} Ilmu Pemerintahan

e-mail: achmad2505@gmail.com

itokwicaksono@unmuhjember.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam menurunkan angka stunting di Desa Sumber Agung. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi perencanaan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan, termasuk pemerintah desa, puskesmas, dan penerima bantuan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan observasi dan analisis data untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang proses evaluasi kebijakan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Berdasarkan temuan analisis data menunjukkan bahwa pencapaian tujuan program, keberlanjutan program, dampak program (*impact*), kesesuaian dengan kebutuhan, kualitas pelaksanaan program, analisis hambatan dan tantangan, rasio input-output, biaya operasional, waktu pelaksanaan, penggunaan sumber daya, biaya operasional, Perbandingan dengan Standar atau *Benchmark*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) memiliki dampak positif dalam perbaikan status gizi anak, meskipun tantangan dalam distribusi dan kualitas bahan makanan masih perlu diperbaiki.

Kata kunci: Evaluasi Program; Efektivitas, Efisiensi; Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

ABSTRACT

This study aims to analyze the strategies implemented by the Curahnongko Village government in an effort to improve the quality of public services in the field of Population Administration. Using qualitative research methods, this study explores various aspects that influence the effectiveness and efficiency of public services in the village. Data were collected through direct observation, in-depth interviews with the Village Head, village government employees, and residents receiving services, and supported by relevant documentation. The results revealed that although the village government has made various efforts to improve service quality, such as improving facilities and infrastructure and training for village officials, there are still significant obstacles in terms of simplifying administrative procedures and lack of socialization to the community regarding the necessary requirements. Therefore, this study concludes that the strategies implemented by the Curahnongko Village government have not fully met the ideal public service standards, as measured through the theoretical framework of public services according to Parasuraman. This research is expected to make a significant contribution to the development of more effective strategies to improve the quality of public services in the field of Population Administration in Curahnongko Village. In addition, the results of this study are also expected to serve as a reference for other villages facing similar challenges in improving the quality of public services.

Keywords: Program Evaluation; Effectiveness; Efficiency; Supplementary Feeding

PENDAHULUAN

Stunting menjadi tantangan yang signifikan di Indonesia karena dampaknya yang luas terhadap kesehatan, perkembangan, dan masa depan generasi muda. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi fisik anak tetapi juga dapat mengganggu perkembangan kognitif dan kemampuan belajar mereka. Hasil Kajian Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2019 oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa angka stunting balita di Indonesia mencapai 24,4 persen pada tahun 2021 (Kemenkes, 2024). Hal tersebut berarti bahwa hampir seperempat balita di Indonesia akan mengalami stunting dari tahun sebelumnya. Untuk memastikan generasi mendatang dapat tumbuh dengan baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat, penanganan stunting harus menjadi prioritas utama, melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak.

Faktor penting yang menyebabkan stunting adalah kondisi gizi ibu selama kehamilan. Riwayat gizi ibu hamil sangat penting untuk kesehatan dan perkembangan janin. Ibu yang kekurangan gizi, seperti kekurangan zat besi, folat, atau nutrisi penting lainnya, memiliki kemungkinan lebih besar untuk melahirkan anak stunting. Berat badan bayi yang kurang dapat disebabkan oleh masalah pertumbuhan dalam kandungan, yang meningkatkan risiko stunting (WHO, 2014). Berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, upaya perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan baik secara individu maupun masyarakat. Hal ini dilakukan melalui pola konsumsi makanan yang lebih seimbang, peningkatan kesadaran akan gizi, aktivitas fisik, serta kesehatan. Selain itu, upaya ini juga mencakup peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, pemerintah telah menetapkan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai layanan gizi prioritas. Program ini difokuskan terutama pada balita dari keluarga kurang mampu yang mengalami kekurangan gizi. Bahan makanan yang digunakan dalam program PMT sebaiknya berasal dari sumber lokal atau dapat diproduksi di daerah setempat, sehingga meningkatkan peluang keberlanjutan program. Menurut Bagian Gizi Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dalam Wati (2020). Oleh karena itu PMT merupakan bagian penting dari upaya pemerintah guna menangani permasalahan gizi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

Penggunaan bahan pangan lokal dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) menjadi salah satu strategi untuk mengatasi masalah gizi pada balita sekaligus mencegah stunting. PMT berbahan pangan lokal tidak hanya berfungsi sebagai tambahan nutrisi, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi keluarga mengenai pentingnya pola makan seimbang dan penggunaan sumber pangan lokal yang tersedia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi balita yang kurang gizi dan membantu mereka mengembalikan berat badan ke tingkat normal yang sesuai dengan kurva pertumbuhan. Pada tahun 2023, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,5%, dan ditargetkan menurun hingga 14% pada akhir tahun 2024 (Benedikta Desideria, 2024). Oleh karena itu program ini berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat dan produktivitas nasional dengan memanfaatkan potensi pangan lokal yang melimpah. Tenaga medis yang ada harus memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas untuk beroperasi. Secara kuantitas, jumlah tenaga yang tersedia harus mencukupi untuk melaksanakan berbagai tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi sasaran, penyuluhan gizi, distribusi makanan, hingga pemantauan dan evaluasi program. Sedangkan kualitas diharapkan tenaga yang terlibat memiliki pendidikan di bidang kesehatan, seperti gizi, keperawatan, atau kesehatan masyarakat. Tenaga yang terlibat, seperti dokter, bidan, perawat, dan ahli gizi, harus memiliki pemahaman mendalam tentang status gizi balita, cara

mengidentifikasi masalah gizi, serta pengetahuan tentang makanan yang bergizi dan sesuai dengan kebutuhan spesifik anak balita.

Pelaksanaan program PMT melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur. Langkah pertama adalah tahap perencanaan, yang mencakup berbagai kegiatan seperti melakukan identifikasi kebutuhan melalui survei lapangan atau pemantauan status gizi masyarakat, menentukan kelompok sasaran prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan, serta menyusun anggaran dan mengatur logistik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program secara efektif. Tahap kedua adalah penyediaan makanan tambahan, yang melibatkan pemilihan jenis makanan bergizi sesuai kebutuhan kelompok sasaran. Makanan yang diberikan hanya sebagai tambahan yang dirancang untuk mengatasi kekurangan nutrisi tertentu seperti protein, vitamin, dan mineral, yang dikonsumsi oleh balita sasaran sehari-hari, bukan sebagai pengganti makanan utama (Nurhayati Darubekti, 2021). Tahap selanjutnya makanan didistribusikan melalui Posyandu, Puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya. Seperti yang diketahui, Posyandu sering digunakan sebagai tempat untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, terutama bagi ibu dan anak, hal ini termasuk menyediakan makanan tambahan untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan mereka. Sedangkan sebagai fasilitas kesehatan yang lebih besar, puskesmas berfungsi sebagai jalur distribusi makanan PMT untuk keluarga yang membutuhkan. Pendistribusian dilakukan secara berkala, minimal satu kali seminggu. Tahap akhir adalah pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi memiliki peran penting agar pelaksanaan program PMT untuk anak balita dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

Indikator keberhasilan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dapat dinilai dengan mempertimbangkan sejumlah elemen penting yang menunjukkan seberapa efektif program tersebut. Pertama, kemampuan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana, termasuk sistem pelaksanaan yang efektif, adalah cara untuk mengukur keberhasilan program. Kedua, keberhasilan sasaran ditentukan oleh data yang tepat untuk menjangkau anak-anak stunting dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang gizi dan kesehatan. Ketiga, indikator penting tentang seberapa baik program memenuhi kebutuhan masyarakat adalah kepuasan masyarakat. Keempat, tingkat input dan output juga dipertimbangkan. Terakhir, pencapaian tujuan menyeluruh menilai efek jangka panjang dari program PMT, yang mencakup penurunan angka stunting dan peningkatan status gizi anak. Indikator ini menunjukkan seberapa baik program berhasil mencapai tujuan utamanya. Secara keseluruhan, indikator ini sangat penting untuk menunjukkan seberapa efektif Program Pemberian Makanan Tambahan dalam meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak di masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, (2021) Kemenkes menerbitkan Surat Edaran yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4631/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita Gizi Kurang Dan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (2021). Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021. Peraturan tersebut memuat Alokasi dana desa dapat digunakan untuk program PMT sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya bagi balita dan ibu hamil.

Di Kabupaten Jember Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dilaksanakan mulai 29 September 2023 sebagai bagian dari upaya pengentasan stunting. Program ini dimulai di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Protelindo dan Pemerintah Kabupaten Jember. Program tersebut dirancang untuk berlangsung selama tiga bulan, menyediakan PMT berupa susu formula, abon, dan telur bagi anak-anak berisiko stunting. Kemudian di Desa Tempurejo Kab Jember, program PMT melibatkan penyediaan puding daun kelor sebagai makanan

tambahan yang mengandung banyak nutrisi dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat (Dendy Kharisna et al., 2024). Adanya keterlibatan aktif orang tua dalam menyiapkan dan menyediakan makanan menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga gizi seimbang bagi anak-anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi program pemberian makanan tambahan (PMT). Penelitian ini menggunakan teori Evaluasi dari William N. Dunn untuk mendukung keberhasilan program makanan tambahan di Kabupaten Jember khususnya di Desa Sumber Agung. Menurut William N. Dunn teori evaluasi terdapat beberapa faktor. Faktor Efektivitas dan Efisiensi yang menjadi fokus penelitian ini. Efektivitas merujuk pada sejauh mana tujuan program tercapai, yaitu apakah program PMT mampu memberikan dampak signifikan dalam mengurangi angka stunting di Desa Sumber Agung. Dalam konteks ini, efektivitas mencakup evaluasi hasil yang diharapkan, seperti perbaikan status gizi anak, peningkatan berat dan tinggi badan yang sesuai dengan usia, serta penurunan prevalensi stunting dalam populasi sasaran. Efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam program PMT, efisiensi dapat dilihat dari bagaimana alokasi anggaran, tenaga kerja, waktu, dan logistik digunakan untuk mendistribusikan makanan tambahan secara tepat sasaran. Sebuah program dapat dinilai efisien jika dengan sumber daya yang tersedia mampu menjangkau seluruh anak berisiko stunting di Desa Sumber Agung dengan kualitas layanan yang memadai. Evaluasi efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan terhadap hasil yang diperoleh, seperti biaya per anak yang terjangkau atau penghematan biaya jangka panjang akibat penurunan angka stunting.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Istilah "kebijaksanaan" dan "kebijakan" memiliki banyak arti. Hogwood dan Gunn dalam penelitian (Islamy, 2014) mengatakan ada sepuluh cara orang menggunakan istilah kebijakan, seperti dikutip oleh Parsons (2005:15). Istilah-istilah ini dapat diartikan sebagai bidang aktivitas, proposal khusus, keputusan pemerintah, otorisasi formal, program, output, hasil (hasil), teori atau model, dan proses. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kebijakan" merupakan sekumpulan gagasan dan prinsip yang digunakan dalam menjalankan tugas, kepemimpinan, serta menentukan tindakan dalam pemerintahan, organisasi, atau bidang lainnya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai pernyataan mengenai tujuan, cita-cita, prinsip, atau maksud yang menjadi pedoman dalam manajemen untuk mencapai sasaran tertentu. Sedangkan dalam istilah "publik" dapat menjadi lebih jelas ketika digunakan bersamaan dengan istilah "privat". Sejarah istilah publik dapat ditemukan di negara Yunani dan Romawi Kuno. Mereka menggunakan kata publik sebagai koinion dan privat sebagai idion. Mereka juga menggunakan kata Romawi res-publica dan privat sebagai res-privata.

Menurut (Riant Nugroho, 2009) suatu negara yang tidak mempunyai kebijakan publik dianggap tidak berhasil karena kehidupan masyarakatnya hanya dikendalikan oleh individu atau sekelompok orang yang bertindak secara otoriter demi kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri. Menurut Dye dalam Dwiyanto Indiahono (2009) kebijakan publik merupakan "Whatever government choose to do or not to do" apa pun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Maknanya kebijakan publik juga mencakup upaya untuk memahami apa yang dilakukan pemerintah, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan konsekuensi dari pelaksanaan dan penegakan kebijakan publik.

2. Evaluasi Kebijakan

Istilah "evaluasi" berasal dari bahasa Inggris *evaluation*, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penilaian. Kata dasar dari *evaluation* adalah *value*, yang memiliki makna nilai dalam bahasa Indonesia (Hajaroh, 2019) evaluasi adalah langkah penting dalam implementasi kebijakan. Hasil evaluasi kebijakan digunakan untuk membuat penilaian yang bermanfaat untuk membuat keputusan

terkait pengembangan kebijakan di masa depan (Kosowan et al., 2022). Menurut Iman Amanda Permatasari dalam penelitian Situmorang (Amanda, 2020) evaluasi kebijakan dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan gagal dan apakah kebijakan tersebut memiliki dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa kegiatan fungsional yang dilakukan selama evaluasi tersebut tidak hanya diakhiri, tetapi juga terjadi di setiap tahapan kebijakan.

Thomas R. Dye dalam Parsons (2008:547), evaluasi kebijakan merupakan "pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik". Dengan kata lain, evaluasi kebijakan merupakan pemeriksaan yang terstruktur, objektif, dan berbasis data tentang bagaimana kebijakan dan program publik berdampak pada tujuan yang ingin dicapai. Menurut (Halimah, 2020) Evaluasi adalah proses mendapatkan penilaian baik saat kegiatan sedang berjalan maupun saat telah berakhir. (Affrian, 2020) Perkiraan atau penilaian terhadap konteks, pelaksanaan, dan dampak pelaksanaan kebijakan dikenal sebagai evaluasi kebijakan. (Peter R, 1982) evaluasi kebijakan mencakup berbagai tahapan, mulai dari evaluasi desain program, implementasi, hingga hasil dan dampak program. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan mencakup proses pelaksanaan program, bukan hanya hasil akhir. Konsep umum dari evaluasi kebijakan adalah sebuah proses atau tindakan yang dilakukan dengan cara yang konsisten dan melibatkan alasan mengapa suatu kebijakan berhasil atau tidak berhasil (Prabowo et al., 2022). (Peter Rossi, 1982) mengemukakan Evaluasi dilaksanakan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan tiga fokus penelitian evaluasi, yaitu perumusan konsep dan desain program, pelaksanaan program (meliputi pemantauan dan akuntabilitas), serta manfaat dari program tersebut. (penilaian dampak dan efisiensi).

Menurut Rossi dan Freeman, evaluasi dilakukan untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait tiga fokus utama dalam penelitian evaluasi. Pertama, evaluasi bertujuan untuk menilai konseptualisasi dan desain program, yaitu memastikan bahwa program dirancang dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, evaluasi memeriksa implementasi program, yang melibatkan pemantauan pelaksanaan untuk memastikan akuntabilitas dan kesesuaian antara rencana dan realisasi di lapangan. Ketiga, evaluasi menilai utilitas program, yaitu dampak program terhadap sasaran yang dituju serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Menurut Carol H. Weiss dalam penelitian (Akib, 2020) Tujuan dan lingkup analisis (riset) evaluasi adalah Untuk menilai pengaruh suatu program terhadap tujuan yang ingin dicapai, evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk mendukung pengambilan keputusan lebih lanjut mengenai program tersebut serta meningkatkan kualitasnya di masa depan. Fokus dampak lebih mengarah pada hasil yang dicapai oleh program, bukan pada aspek efisiensi, integritas, moral, atau kepatuhan terhadap aturan dan standar. Dengan membandingkan dampak yang dihasilkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, penilaian dilakukan menggunakan kriteria yang jelas untuk mengukur sejauh mana program berjalan dengan baik. Weiss dengan jelas menyatakan bahwa analisis evaluasi lebih difokuskan pada mengukur efek dan dampak suatu program atau kebijakan terhadap masyarakat, daripada menilai efisiensi, integritas pelaksanaan, atau aspek lain yang berkaitan dengan standar operasional. Karena tujuan utama kebijakan adalah menciptakan dampak atau perubahan, maka wajar jika evaluasi difokuskan pada hal tersebut.

3. Evaluasi Kebijakan menurut William N Dunn

Menurut (William N. Dunn, 1999) Istilah evaluasi dapat diartikan sama dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian nilai (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Penaksiran (*appraisal*) menunjukkan pemberian skor atau tingkat berdasarkan indikator yang telah ditentukan, sedangkan pembagian angka (*rating*) merujuk pada proses memancarkan kualitas atau nilai sesuatu secara keseluruhan. Penilaian (*assessment*) mencakup pengumpulan data dan analisis untuk memberikan gambaran tujuan tentang hasil atau kinerja program atau kebijakan tertentu. Istilah ketiga menunjukkan bahwa evaluasi bukan hanya memberikan pendapat; itu juga memerlukan teknik yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat diterima dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. (William N. Dunn, 1999) menjelaskan berbagai kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Efektivitas : Apakah hasil yang digunakan telah dicapai. Fokus evaluasi ini tidak hanya pada proses atau input yang digunakan, tetapi pada hasil akhir program dengan mengukur efektivitas, evaluator dapat menentukan apakah tujuan utama yang menjadi alasan pelaksanaan program.
- b. Efisiensi : Seberapa besar usaha yang diperlukan untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Efisiensi umumnya diukur melalui analisis biaya per unit hasil atau layanan yang dihasilkan. Sebuah kebijakan dianggap efisien jika mampu mencapai tingkat efektivitas tertinggi dengan menggunakan tenaga kerja.
- c. Kecukupan : Tingkat keberhasilan hasil yang diperoleh dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kecukupan, sebagai salah satu kriteria evaluasi menurut William N. Dunn, menyatakan bahwa Kecukupan merujuk pada seberapa besar tingkat efektivitas mampu memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang dibutuhkan untuk mengatasi suatu masalah. Kecukupan mengindikasikan seberapa efektif suatu program atau kebijakan dapat memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah yang menjadi sarannya.
- d. Pemerataan : Manfaat biaya dialokasikan secara adil kepada berbagai kelompok yang berbeda. Pemerataan merupakan salah satu kriteria penting dalam mengevaluasi kebijakan publik karena bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai kelompok masyarakat menerima manfaat yang adil sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi mereka.
- e. Responsivitas : Kebijakan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan, harapan, atau prinsip-prinsip yang dipegang oleh kelompok tertentu. Responsivitas merujuk pada sejauh mana kebijakan publik atau program mampu memenuhi kebutuhan, keinginan, dan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh kelompok target.
- f. Ketepatan : Apakah tujuan yang diharapkan benar-benar memiliki manfaat atau nilai yang dianggap penting. Ketepatan dalam teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif. Dalam evaluasi ini, ketepatan menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan dan kebutuhan masyarakat yang menjadi targetnya.

Menurut (William N. Dunn, 1999) Evaluasi memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari metode analisis kebijakan lain. Perbedaan karakteristik ini dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek berikut:

1. Interdependensi fakta nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”.
2. Fokus pada masa kini dan masa lalu. Evaluasi lebih menekankan hasil yang telah dicapai saat ini dan sebelumnya, berbeda dengan pendekatan advokatif yang lebih berorientasi pada hasil di masa depan.
3. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang menjadi dasar evaluasi bersifat ganda, karena dianggap sebagai tujuan sekaligus sebagai sarana untuk mencapainya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu evaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam upaya menurunkan angka stunting di Desa Sumber Agung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada *Analysus Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi proses analisis data ke dalam beberapa tahapan, yakni pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta pembuatan kesimpulan atau verifikasi (*conclusions*) (milesandhuberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas

Efektivitas dalam evaluasi kebijakan mengacu pada tingkat keberhasilan Sebuah kebijakan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi kebijakan harus mengukur dampak nyata dari kebijakan tersebut terhadap masalah yang ingin diatasi. Efektivitas tidak dilihat dari output kebijakan, tetapi juga dari outcome-nya, yaitu perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau lingkungan sebagai hasil dari implementasi kebijakan. Dalam konteks program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), efektivitas dapat diukur dengan melihat sejauh mana program tersebut berhasil mencapai tujuannya.

1. Pencapaian Tujuan Program

Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) telah mencapai tujuan yang ditetapkan, seperti meningkatkan status gizi, mengurangi angka malnutrisi, atau meningkatkan partisipasi masyarakat. Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang telah dilaksanakan di Dusun Sumber Agung selama satu tahun terakhir telah mendapatkan respons yang positif dari berbagai pihak. Program ini dijalankan melalui kerja sama yang solid antara pengelola program dengan dinas kesehatan serta pihak-pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, khususnya balita dan ibu hamil. Selama pelaksanaannya, beberapa kemajuan yang signifikan telah berhasil dicatat. Berdasarkan data terakhir yang diperoleh, terlihat adanya peningkatan berat badan pada sejumlah balita yang sebelumnya termasuk dalam kategori kurus. Hal ini menunjukkan bahwa program ini telah memberikan dampak positif terhadap status gizi anak-anak di dusun tersebut. Selain itu, ibu hamil yang rutin menerima makanan tambahan juga menunjukkan perkembangan kesehatan yang lebih baik. Mereka terlihat lebih sehat, aktif, dan memiliki energi yang cukup untuk menjalani kehamilan dengan baik. Program ini dinilai berjalan secara efektif di Dusun Sumber Agung. Antusiasme masyarakat terhadap program ini terlihat sangat tinggi, yang menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaannya. Dukungan dan partisipasi aktif dari warga dusun telah membuat program ini semakin terarah dan tepat sasaran. Dengan demikian, Program Pemberian Makanan Tambahan ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi juga telah menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat di Dusun Sumber Agung.

2. Keberlanjutan Program

Program memiliki potensi untuk dilanjutkan atau dikembangkan lebih lanjut, tetapi hal itu membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan dan keberlanjutan sumber daya. Program Pemberian Makanan Tambahan dianggap sangat penting bagi warga desa, terutama untuk anak balita dan ibu hamil. Diharapkan agar program ini dapat terus dilanjutkan mengingat dampak positifnya yang signifikan bagi masyarakat. Rencana peningkatan koordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk dinas kesehatan, LSM, dan sektor swasta, sedang disusun. Selain itu, partisipasi masyarakat juga direncanakan untuk ditingkatkan lebih besar. Untuk memastikan keberlanjutan program, beberapa langkah telah dipertimbangkan, seperti mengadakan kegiatan gotong royong atau menerima sumbangan sukarela. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya program ini juga akan terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran dan dukungan dari warga. Program Pemberian Makanan Tambahan dinilai sangat penting bagi warga desa, khususnya bagi anak balita dan ibu hamil. Diharapkan program ini dapat terus dilanjutkan mengingat dampak positifnya yang signifikan bagi masyarakat. Rencana peningkatan koordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk dinas kesehatan, LSM, dan sektor swasta, sedang disusun. Selain itu, partisipasi masyarakat juga direncanakan untuk digalang lebih besar guna mendukung keberlanjutan program ini. Untuk memastikan kelanjutan program, beberapa upaya telah direncanakan, seperti mengadakan kegiatan gotong royong atau menerima sumbangan sukarela dari masyarakat. Sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya program ini juga akan terus dilakukan kepada masyarakat agar pemahaman dan dukungan terhadap program

semakin meningkat. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat terus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi warga desa.

3. Dampak Program (*impact*)

Dampak nyata dari program terhadap target populasi, misalnya Dampaknya cukup signifikan, terutama dalam hal peningkatan berat badan anak dan penurunan angka stunting. Dampak nyata dari program terhadap target populasi terlihat cukup signifikan, terutama dalam hal peningkatan berat badan anak dan penurunan angka stunting. Sebelum program dilaksanakan, tercatat beberapa anak balita mengalami berat badan di bawah standar (*underweight*) dan kasus stunting yang cukup memprihatinkan. Namun, setelah pemberian makanan tambahan secara rutin, peningkatan berat badan terlihat pada sebagian besar anak. Selain itu, ibu hamil yang sebelumnya mengalami anemia juga menunjukkan perbaikan kondisi kesehatan setelah menerima makanan kaya zat besi. Sebagai contoh, seorang anak yang awalnya memiliki berat badan 9 kg berhasil meningkat menjadi 10,5 kg setelah 3 bulan mengikuti program ini. Di tingkat RT, anak-anak yang sebelumnya terlihat kurus dan sering sakit kini tampak lebih sehat dan aktif setelah rutin menerima makanan tambahan dari Posyandu. Tidak hanya anak-anak, ibu hamil juga menunjukkan antusiasme tinggi karena merasa kesehatannya diperhatikan melalui program ini. Meskipun program ini dinilai efektif, terdapat saran untuk meningkatkan kualitas asupan gizi dengan menambah variasi makanan, seperti buah-buahan atau makanan siap saji yang bergizi. Hal ini diharapkan dapat semakin memperkuat dampak positif program terhadap kesehatan dan pertumbuhan anak, serta kondisi ibu hamil di masa mendatang.

4. Kesesuaian dengan Kebutuhan

Program telah memenuhi kebutuhan riil penerima manfaat, termasuk kecukupan jenis dan jumlah makanan yang diberikan. Misalnya jika ada anak yang berat badannya kurang, diprioritaskan untuk mendapatkan makanan tambahan yang tinggi kalori dan protein. Sebelum makanan tambahan dibagikan, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan selalu dilakukan untuk anak balita, sementara pemeriksaan kesehatan dilaksanakan untuk ibu hamil. Dari data yang diperoleh, kondisi gizi mereka dapat diketahui dengan lebih akurat. Misalnya, jika ditemukan anak dengan berat badan kurang, Makanan tambahan yang kaya akan kalori dan protein diprioritaskan untuk mendukung pertumbuhan mereka. Untuk ibu hamil, makanan tambahan dipastikan mengandung zat besi dan asam folat yang cukup untuk mencegah anemia dan mendukung kesehatan janin. Makanan tambahan yang diberikan, seperti biskuit dan susu, dilaporkan mudah disajikan dan disukai oleh anak-anak. Salah satu respons yang diterima adalah bahwa biskitnya dianggap enak dan susunya mudah disajikan, sehingga anak-anak menyukainya. Hal ini tidak hanya memastikan asupan gizi yang cukup, tetapi juga meningkatkan partisipasi dan antusiasme anak-anak dalam mengonsumsi makanan tambahan tersebut. Dengan demikian, program ini tidak hanya efektif dalam meningkatkan status gizi, tetapi juga menciptakan pengalaman yang positif bagi penerima manfaat.

5. Kualitas Pelaksanaan Program

Kualitas implementasi program berjalan dengan baik, Sebelum dibagikan, makanan tambahan diperiksa oleh petugas gizi untuk memastikan kualitasnya, evaluasi terhadap kesesuaian dengan kebutuhan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program. Kualitas implementasi program berjalan dengan baik. Sebelum dibagikan, makanan tambahan diperiksa oleh petugas gizi untuk memastikan kualitasnya, termasuk pengecekan tanggal kedaluwarsa dan kondisi kemasan. Evaluasi terhadap kesesuaian dengan kebutuhan gizi penerima manfaat juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program. Misalnya, makanan tambahan yang tinggi kalori dan protein diberikan kepada anak balita dengan berat badan kurang, sementara ibu hamil menerima makanan yang kaya zat besi dan asam folat. Selain itu, monitoring secara berkala dilakukan untuk memastikan bahwa makanan tersebut dikonsumsi dengan benar oleh penerima manfaat. Hal ini membantu memastikan bahwa program tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberikan dampak yang optimal bagi kesehatan dan pertumbuhan anak serta ibu hamil.

6. Analisis Hambatan dan Tantangan

Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas program, seperti pendistribusian, partisipasi masyarakat, ketersediaan logistik dan variasi makanan menjadi hambatan dan tantangan dalam program. Distribusi makanan tambahan sering terkendala oleh akses transportasi yang sulit, terutama di daerah pedesaan atau pegunungan yang memiliki infrastruktur jalan yang buruk atau jarak tempuh yang jauh. Selain itu, fasilitas penyimpanan di beberapa Posyandu dinilai kurang memadai, seperti kurangnya kulkas atau ruang penyimpanan yang memenuhi standar, sehingga dapat memengaruhi kualitas makanan, terutama yang mudah rusak atau memerlukan suhu tertentu. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya program ini juga menjadi hambatan, karena hal tersebut menyebabkan pemanfaatannya tidak optimal. Misalnya, beberapa orang tua tidak menyadari manfaat jangka panjang dari makanan tambahan bagi pertumbuhan anak dan kesehatan ibu hamil. Partisipasi masyarakat yang tidak konsisten, seperti orang tua yang tidak rutin membawa anak ke Posyandu, juga mengurangi efektivitas program. Hal ini sering disebabkan oleh faktor kesibukan, kurangnya motivasi, atau bahkan ketidaktahuan tentang jadwal distribusi makanan tambahan. Selain itu, keterbatasan stok makanan tambahan, khususnya di daerah terpencil, menjadi tantangan lain yang signifikan. Stok yang tersedia sering tidak mencukupi untuk semua penerima manfaat, sehingga beberapa anak atau ibu hamil terpaksa tidak mendapatkan asupan gizi yang seharusnya mereka terima. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, petugas lapangan, dan masyarakat, serta peningkatan alokasi anggaran dan logistik untuk memastikan ketersediaan makanan tambahan yang merata dan berkelanjutan.

B. Efisiensi

Efisiensi dalam evaluasi kebijakan merujuk pada seberapa optimal penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan untuk mencapai output atau hasil yang diinginkan dengan biaya serendah mungkin. Dengan kata lain, efisiensi berkaitan dengan hubungan antara input (sumber daya yang digunakan) dan output (hasil yang dicapai). Dalam konteks Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), konsep efisiensi dapat diterapkan untuk mengevaluasi sejauh mana program ini mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya secara optimal.

1. Rasio Input – Output

Dalam indikator ini berfungsi untuk menilai perbandingan antara sumber daya yang digunakan (input) dan hasil yang dicapai (output). Pada hal ini dana yang digunakan untuk pendistribusian makanan merupakan (input), Peningkatan kesehatan balita dan ibu hamil merupakan (output) dalam program ini. Program ini dinilai sudah cukup baik dalam hal penggunaan sumber daya. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dan daerah digunakan untuk membeli bahan makanan bergizi, seperti beras, telur, dan susu. Kader desa dan relawan dilibatkan dalam proses distribusi, dan hasilnya, peningkatan kesehatan balita dan ibu hamil di desa ini telah terlihat. Rencana ke depan termasuk penggunaan sistem digital untuk memantau distribusi dan pelaporan. Dukungan dari pihak swasta atau LSM juga akan dicari untuk menambah anggaran dan sumber daya. Selain itu, pelatihan akan diberikan kepada kader desa agar lebih efektif dalam pendistribusian dan monitoring. Saat ini, bahan makanan seperti beras, telur, dan susu telah diberikan dengan kualitas yang cukup baik. Namun, disadari perlunya diversifikasi untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lebih lengkap. Saran yang diberikan antara lain penambahan makanan seperti kacang-kacangan, sayuran hijau, dan buah-buahan lokal untuk meningkatkan asupan protein nabati dan sayuran. Edukasi kepada penerima manfaat tentang cara mengolah makanan tersebut agar gizinya tetap terjaga juga dianggap penting.

2. Biaya Operasional

Biaya yang dikeluarkan proporsional dengan hasil, dimana dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah desa menghasilkan hasil yang efektif. Anggaran distribusi dialokasikan untuk biaya bahan

bakar, perawatan kendaraan, dan honor sopir. Biaya yang dikeluarkan proporsional dengan hasil yang dicapai, di mana anggaran pemerintah desa menghasilkan dampak efektif. Anggaran distribusi mencakup biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, dan honor sopir, dengan upaya penghematan melalui pemilihan rute terpendek. Biaya satu paket makanan tambahan sekitar Rp 50.000 per minggu per penerima. Dalam tiga bulan terakhir, angka stunting pada balita turun 10%, menunjukkan efektivitas program. Namun, kendala seperti akses transportasi terbatas, fasilitas penyimpanan kurang memadai, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal masih perlu diatasi. Upaya peningkatan sosialisasi, perbaikan infrastruktur, dan variasi makanan tambahan diperlukan untuk memastikan program berkelanjutan dan lebih efektif.

3. Waktu Pelaksanaan

Program berjalan sesuai jadwal dan waktu yang dialokasikan yaitu satu minggu satu kali. Namun terkadang terdapat penundaan yang menyebabkan inefisiensi dalam pencapaian tujuan. Program ini direncanakan untuk berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu dua minggu sekali. Namun, dalam pelaksanaannya, beberapa kali distribusi mengalami keterlambatan akibat kendala logistik, seperti cuaca buruk yang menghambat perjalanan atau kerusakan kendaraan distribusi yang digunakan. Alokasi sumber daya untuk distribusi diatur secara cermat berdasarkan jumlah penerima manfaat dan lokasi mereka, dengan mempertimbangkan faktor geografis dan aksesibilitas. Kendaraan desa dimanfaatkan untuk mendistribusikan makanan tambahan, sementara kader Posyandu dilibatkan secara aktif untuk memastikan bahan makanan sampai tepat waktu ke tangan penerima manfaat. Sebagian besar distribusi berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan, menunjukkan komitmen tinggi dari tim pelaksana. Namun, beberapa kali keterlambatan tidak dapat dihindari, terutama ketika cuaca buruk seperti hujan lebat atau banjir menghambat akses jalan, atau ketika terjadi keterlambatan pengiriman bahan makanan dari pemasok. Untuk meminimalkan dampak keterlambatan, tim pelaksana berupaya mencari solusi alternatif, seperti menggunakan rute lain atau mengatur ulang jadwal distribusi. Jadwal distribusi makanan tambahan ditetapkan setiap dua minggu sekali, biasanya pada hari Jumat. Pemilihan hari Jumat didasarkan pada pertimbangan praktis, karena banyak warga dapat hadir ke Posyandu setelah menyelesaikan aktivitas pagi mereka, seperti bekerja di ladang atau mengurus rumah tangga. Hal ini memungkinkan partisipasi yang lebih tinggi dari masyarakat, sekaligus memastikan bahwa makanan tambahan dapat diterima secara langsung oleh penerima manfaat. Meskipun demikian, untuk meningkatkan ketepatan waktu distribusi ke depannya, diperlukan perbaikan dalam manajemen logistik, seperti perawatan rutin kendaraan distribusi, penyediaan cadangan kendaraan, serta koordinasi yang lebih baik dengan pemasok bahan makanan. Dengan demikian, program ini dapat berjalan lebih lancar dan memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat.

4. Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya (dana, bahan makanan, tenaga kerja) digunakan secara efektif dan tidak ada pemborosan. Bendahara Desa melakukan pencatatan yang detail untuk setiap pengeluaran dan melaporkannya secara rutin kepada pemerintah daerah. Biaya distribusi dalam program ini terutama digunakan untuk bahan bakar dan perawatan kendaraan, dengan upaya penghematan yang dilakukan melalui pemilihan rute terpendek dan optimalisasi jadwal distribusi. Selain itu, biaya administrasi dialokasikan untuk keperluan dokumen, fotokopi, dan komunikasi, dengan upaya penghematan yang dilakukan melalui pemanfaatan teknologi seperti email atau WhatsApp untuk mengurangi biaya percetakan dan komunikasi konvensional. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, di mana biaya administrasi kadang membengkak akibat kebutuhan mendadak, seperti perbaikan kendaraan darurat atau peningkatan biaya komunikasi dalam situasi tertentu. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, pencatatan detail setiap pengeluaran dilakukan secara rutin, dan laporan keuangan disampaikan secara berkala kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kerja sama yang erat dengan koordinator program dan kader desa juga dipastikan agar dana digunakan secara tepat sasaran dan efisien. Biaya operasional program ini mencakup tiga komponen utama, yaitu

pembelian bahan makanan, distribusi, dan penyimpanan. Dari total anggaran yang dialokasikan, sekitar 5% (misalnya, Rp 10 juta dari total anggaran Rp 200 juta) digunakan untuk biaya administrasi, sementara sisanya dialokasikan untuk kegiatan inti program. Meskipun upaya penghematan telah dilakukan, keterbatasan anggaran tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi. Untuk mengoptimalkan penggunaan dana, beberapa langkah perbaikan dapat dipertimbangkan, seperti peningkatan efisiensi logistik, pemanfaatan teknologi digital untuk mengurangi biaya administrasi, dan pencarian sumber pendanaan tambahan melalui kerja sama dengan pihak swasta atau lembaga donor. Dengan demikian, program ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sambil tetap memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

5. Perbandingan dengan Standar atau Benchmark

Mengevaluasi program pemberian makanan tambahan dengan membandingkannya dengan program serupa di Desa lain untuk membuat program lebih baik dan sesuai dengan standar yang diakui. Evaluasi program pemberian makanan tambahan dilakukan dengan membandingkannya dengan program serupa di desa-desa lain dalam kabupaten yang sama, guna mengidentifikasi peluang perbaikan dan memastikan program ini sesuai dengan standar yang diakui. Beberapa desa di kabupaten ini telah menunjukkan hasil yang lebih baik melalui inovasi seperti penggunaan sistem digital untuk memantau distribusi dan perkembangan status gizi penerima manfaat, serta pelibatan lebih banyak relawan dalam pelaksanaan program. Rencana untuk mempelajari dan mengadopsi praktik terbaik dari desa-desa tersebut sedang dipertimbangkan untuk diterapkan di lokasi ini, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Standar program ini mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh dinas kesehatan, yang mencakup tiga aspek utama: cakupan penerima manfaat, ketepatan waktu distribusi, dan dampak terhadap status gizi. Secara umum, program ini dinilai telah memenuhi standar yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan berat badan anak balita dan penurunan angka stunting. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan, seperti perluasan cakupan penerima manfaat dan peningkatan ketepatan waktu distribusi, terutama di daerah terpencil. Beberapa saran telah diajukan untuk meningkatkan kualitas program, di antaranya adalah penambahan jumlah kader Posyandu untuk memperluas jangkauan pelayanan, penyediaan kendaraan khusus distribusi guna mengatasi kendala transportasi, dan peningkatan koordinasi dengan pemasok bahan makanan untuk memastikan bahan makanan tiba tepat waktu dan dalam kondisi baik. Selain itu, pelibatan teknologi digital untuk monitoring dan evaluasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang lebih intensif, juga dianggap penting untuk memastikan program ini berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan program pemberian makanan tambahan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya anak balita dan ibu hamil.

PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk mengurangi angka stunting di Desa Sumber Agung dapat dilaksanakan dengan mengacu pada Teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn, yang melibatkan beberapa dimensi, di antaranya:

Efektivitas: Pencapaian Tujuan Program, Keberlanjutan Program, Dampak Program (impact), Kesesuaian dengan Kebutuhan, Kualitas Pelaksanaan Program, Analisis Hambatan dan Tantangan

Efisiensi: Rasio Input – Output, Biaya Operasional, Waktu Pelaksanaan, Penggunaan Sumber Daya, Biaya Operasional, Perbandingan dengan Standar atau Benchmark

Dengan menerapkan beberapa dimensi tersebut evaluasi program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dapat lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Dengan demikian, program PMT dapat menjadi lebih terarah, transparan, dan berdampak signifikan terhadap perbaikan gizi masyarakat.

Saran

Untuk objek penelitian, Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan penurunan angka stunting di Desa Sumber Agung meliputi beberapa aspek yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Pertama, diharapkan pihak pemerintah dan petugas kesehatan untuk mengeksplorasi variasi jenis makanan tambahan yang diberikan dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta menganalisis nilai gizi dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap makanan tersebut. Selain itu, fokus pada perubahan profil kesehatan anak-anak sasaran program, termasuk pengukuran indikator status gizi seperti berat badan dan tinggi badan sebelum dan setelah intervensi, akan memberikan wawasan penting mengenai dampak program. Pemerintah juga perlu mencakup aspek persepsi orang tua terhadap PMT, mengidentifikasi harapan, kepuasan, serta kendala yang mereka hadapi dalam partisipasi.

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam upaya menurunkan angka stunting di Desa Sumber Agung, beberapa saran berikut dapat dipertimbangkan. Pertama, peneliti disarankan untuk melakukan studi longitudinal guna memantau perubahan status gizi anak secara berkelanjutan, sehingga dapat menghasilkan data yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program dalam jangka panjang. Kedua, penerapan metode campuran, yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang dampak PMT dari berbagai sudut pandang. Selain itu, penting untuk melibatkan komunitas lokal dalam proses penelitian, termasuk pengumpulan data, agar hasil penelitian lebih relevan dan diterima oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, A. (2020). Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana IAIN Kendari. *Shautut Tarbiyah*, 26(1), 1. <https://doi.org/10.31332/str.v26i1.1441>
- Amanda, I. P. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33–37.
- Benedikta Desideria. (2024). *Stunting Ditargetkan di Angka 14 Persen pada Akhir 2024, Jokowi Ungkap Tantangan untuk Capai Target*. Liputan6.Xom. <https://www.liputan6.com/health/read/5617295/stunting-ditargetkan-di-angka-14-persen-pada-akhir-2024-jokowi-ungkap-tantangan-untuk-capai-target>
- Dendy Kharisna, Angga Arfina, Rizka Febtrina, Sri Yanti, Chatrin Natalia, & Delviana Safitri. (2024). Puding Daun Kelor Sebagai Alternatif Pemberian Makanan Tambahan (Pmt) Pada Anak Untuk Pencegahan Stunting. *Jdistira*, 4(1), 50–59. <https://doi.org/10.58794/jdt.v4i1.739>
- Hajaroh, M. (2019). POHON TEORI EVALUASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). *Foundasia*, 9(1), 27–42. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v9i1.26149>
- Halimah, N. (2020). *EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMP NEGERI TANGERANG SELATAN (Study Kasus SMPN 03 dan SMPN 17 Tangerang Selatan)*.
- Islamy, I. (2014). Definisi dan Makna Kebijakan Publik. *ADPU4410/Modul 1*, 1–41.
- Kemenkes. (2024). *Panduan Hari Gizi Nasional ke 64 Tahun 2024*. Kemenkes.Com. <https://ayosehat.kemkes.go.id/panduan-hari-gizi-nasional-ke-64-tahun-2024#:~:text=Angka stunting di Indonesia masih,Anda unduh dalam format PDF.>
- KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

- HK.01.07/MENKES/4631/2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI BALITA GIZI KURANG DAN IBU HAMIL KURANG ENERGI KRONIS, Pub. L. No. 01.07 (2021).
- Kosowan, L., Shannon, S., Rothney, J., Halas, G., Enns, J., Holmqvist, M., Wener, P., Goertzen, L., & Katz, A. (2022). Informing the Physical Activity Evaluation Framework: A Scoping Review of Reviews. *American Journal of Health Promotion*, 36(2), 340–366. <https://doi.org/10.1177/08901171211050059>
- Nurhayati Darubekti. (2021). Pemberian Makanan Tambahan (Pmt) Pemulihan Bagi Balita Gizi Buruk. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN 2021, "Penelitian Dan Pengabdian Inovatif Pada Masa Pandemi Covid-19,"* 639–978.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pub. L. No. 72 (2021).
- Peter Rossi, F. (1982). Evaluation a systematic approach. In *International Journal of Educational Development* (Vol. 2, Issue 3, p. 291). [https://doi.org/10.1016/0738-0593\(82\)90010-4](https://doi.org/10.1016/0738-0593(82)90010-4)
- Prabowo, R., Setiawan, F., Wibowo, J. M., Oktarina, R., & Rahmadia, N. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(8), 901–907. <https://doi.org/10.36418/jii.v1i8.298>
- Riant Nugroho. (2009). *Public Policy* (7th ed.). PT. Elex Media Komputindo.
- Wati, N. (2020). Analysis of Supplementary Feeding Program (Pmt) on the Nutritional Status of Children in Posyandu, Sembungharjo District, Semarang, 6 (2). *Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Anak Usia Dini*, 6, 94–98.
- WHO. (2014). *Global Nutrition Targets 2025 Stunting Policy Brief*.
- William N. Dunn. (1999). *Analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.